



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022





WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/D);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 2/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.
7. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 983.489.327.133,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.325.014.082,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat belas ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.255.000.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.841.947.807,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.216.268.562,00 (lima belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.011.797.713,00 (seratus tiga puluh satu miliar sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.255.000.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.715.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.530.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 22.745.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.101.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus satu juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.841.947.807,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.575.291.600,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.264.856.207,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.001.800.000,00 (satu miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.216.268.562,00 (Lima belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.823.849.869,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 841.578.308,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.550.840.385,00 (enam miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 131.011.797.713,00 (seratus tiga puluh satu miliar sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - a. Pendapatan BLUD;

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.290.316,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.026.027.397,00 (sembilan miliar dua puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.329.480.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 733.164.313.051,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.774.862.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.389.451.051,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.158.489.327.133,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 980.616.130.669,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah):
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 493.730.745.957,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.965.688.854,00 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.823.187.778,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.096.508.080,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 493.730.745.957,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.328.375.319,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.399.481.813,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.974.112.455,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.524.613.870,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 882.082.500,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.724.470.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.010.000,00 (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.847.115.819,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 198.673.918.258,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 15.457.099.204,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 5.606.067.988,00 (lima miliar enam ratus enam juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 9.928.517.216,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp. 2.932.942.500,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp. 8.760.726.052,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima puluh dua rupiah);

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 416.334.974,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 339.338.418,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 13.516.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus enam belas juta rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 1.284.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 1.049.300.711,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 14

Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.399.481.813,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 90.948.725.783,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 10.770.406.270,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp. 3.512.160,00 (tiga juta lima ratus dua belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 45.676.837.600,00 (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Pasal 15

Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.974.112.455,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.670.514.250,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 57.055.872.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- d. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp. 7.312.939.485,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

- e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 607.200.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.524.613.870,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 73.236.240,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 89.222.280,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 119.150.850,00 (seratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- h. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.753.040.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.045.600.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 17

Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 882.082.500,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 12.936.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 10.428.480,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.577.176,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.298.344,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 474.402.500,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.724.470.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.010.000,00 (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.965.688.854,00 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.776.466.248,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.677.035.718,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.539.202.229,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.490.947.225,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.992.025.460,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.291.363.354,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 91.202.628.620,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.823.187.778,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 15.872.624.278,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 950.563.500,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.096.508.080,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 22.458.378.080,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 2.638.130.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 169.091.131.325,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.760.942.083,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.453.116.310,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.822.087.152,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.554.985.780,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.782.065.139,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar nihil.

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 29

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas efisiensi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Walikota Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 November 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 52/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.782.065.139
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.782.065.139
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.782.065.139
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.782.065.139
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.782.065.139
	Jumlah Belanja	1.158.489.327.133
	Total Surplus/(Defisit)	(175.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	175.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	175.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	175.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	175.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	175.000.000.000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

KOTA MADIUN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.325.014.082
4.1.01	Pajak Daerah	86.255.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.514.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.220.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.220.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	44.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	44.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	250.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	250.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	11.400.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.000.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	490.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	150.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	150.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	40.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	40.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.715.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.680.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.680.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	35.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	35.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	19.530.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	130.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	130.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.400.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.400.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	500.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	500.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	260.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	260.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	260.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.745.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	22.745.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	22.745.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.101.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	25.051.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	25.051.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	50.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	50.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	17.841.947.807
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.575.291.600
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	152.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	152.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.646.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.646.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	47.409.600
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	47.409.600
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	512.490.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	512.490.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	61.060.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	61.060.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	156.332.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	156.332.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.264.856.207
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.532.683.067
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.427.616.067
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	2.595.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	500.067.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	10.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.114.163.140
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	4.114.163.140
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	627.120.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	627.120.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.890.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.890.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	955.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	955.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.001.800.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.800.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.800.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.216.268.562
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.216.268.562
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.823.849.869
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.823.849.869
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	841.578.308
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	841.578.308
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	6.550.840.385
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	6.550.840.385
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.011.797.713
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	28.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	28.000.000
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	28.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.026.027.397
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.026.027.397
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.026.027.397
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	120.329.480.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	120.329.480.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	120.329.480.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	733.164.313.051
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	671.774.862.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	651.806.084.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	92.680.458.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.056.670.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	20.104.424.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	18.922.855.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.097.778.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.339.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.206.665.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	343.901.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	465.495.171.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	465.495.171.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3.102.779.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.033.619.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	285.000.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	660.120.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.124.040.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.527.676.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	25.639.900.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	50.594.413.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	654.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.068.240.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	528.330.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	998.656.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	4.425.540.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	4.854.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.892.788.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.269.155.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.968.778.000
4.2.01.02.01	DID	19.968.778.000
4.2.01.02.01.0001	DID	19.968.778.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.389.451.051
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	61.234.672.051
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	61.234.672.051
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	61.234.672.051
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	154.779.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	154.779.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	154.779.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
	Jumlah Pendapatan	983.489.327.133
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	980.616.130.669
5.1.01	Belanja Pegawai	493.730.745.957
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	258.328.375.319
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	198.673.918.258
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	198.673.918.258
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.457.099.204
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.457.099.204
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.606.067.988
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.606.067.988
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.928.517.216
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.928.517.216

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.907.072.498
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.487.492.498
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	419.580.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.760.726.052
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.596.477.492
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	164.248.560
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	416.334.974
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	416.334.974
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	339.338.418
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	339.338.418
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.516.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.156.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	360.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	390.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	360.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	30.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.284.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.200.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	84.000.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.049.300.711
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.049.300.711
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	147.399.481.813
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	90.948.725.783
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.948.725.783
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.770.406.270
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.770.406.270
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.512.160
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	3.512.160
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	45.676.837.600
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	45.676.837.600
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.974.112.455
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.670.514.250
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	196.359.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	495.900.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	21.315.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	74.602.500

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	849.555.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	21.750.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.310.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	989.407.500
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.010.315.250
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.055.872.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	57.055.872.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	312.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	312.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.586.720
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.586.720
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.312.939.485
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.659.886.430
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.035.353.055
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	617.700.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	607.200.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	56.400.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	550.800.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.524.613.870
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.236.240
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.236.240
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	89.222.280
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	89.222.280
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.150.850
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.150.850
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.753.040.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	167.400.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.440.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.200.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.580.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.045.600.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.045.600.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	882.082.500
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	12.936.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	12.936.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.428.480
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.428.480
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.577.176
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.577.176
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.298.344
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.298.344
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	73.200.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	73.200.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	474.402.500
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	24.827.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	62.700.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.695.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.432.500
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	107.415.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.750.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.430.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	125.097.500

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	138.055.500
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	1.724.470.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	1.724.470.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	1.724.470.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	96.010.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	96.010.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	96.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.965.688.854
5.1.02.01	Belanja Barang	95.776.466.248
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.487.998.338
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.327.859.725
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	763.181.834
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.950.914.517
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.729.055.514
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	12.320.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	15.588.090
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	317.213.450
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	54.597.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.775.966.730
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	8.000.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	442.178.642
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.499.400
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.436.750
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	371.582.182
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	142.328.965
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.277.793.946
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.361.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.291.643.319
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	279.522.283
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	506.499.995
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	141.576.705

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.248.194.191
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.858.225
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	39.850.180
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.390.894.040
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.159.062.321
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.968.211.312
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	541.184.162
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.879.329.635
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	311.731.025
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	13.620.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.705.235.885
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.836.339.006
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	964.224.500
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.301.250
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	332.671.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.419.860.130
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	225.928.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.664.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.427.070.200
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.038.570.560
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	116.626.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	68.670.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.032.114.500
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.150.166.269
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	114.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.288.467.910
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.219.855
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	2.118.545.540
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	167.702.515
5.1.02.02	Belanja Jasa	185.669.535.718
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	136.295.262.265
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.798.250.470
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.956.609.468
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	50.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.748.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	800.550.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	505.610.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	635.313.630
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.202.600.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	517.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.222.238.400
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.088.522.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	591.160.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	390.940.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.539.361.250
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	415.270.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.006.480.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.644.285.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.202.450.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.226.715.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.400.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	457.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.135.451.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	239.372.600
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.250.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	53.639.392
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	575.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.898.537.385
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	966.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	184.852.700
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	70.380.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	58.190.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	304.394.246
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	67.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.722.085.160
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	491.936.699
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.043.593.210
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.149.839.535
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	222.459.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.979.783.235
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	223.645.600

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.511.407.760
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	595.748.465
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	324.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	10.340.066.040
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	5.110.374.620
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.697.241.180
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	29.034.533.400
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	69.586.800
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.593.120.980
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.933.269.370
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	100.438.740
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	903.897.325
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.078.880
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.829.493.355
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	542.535.175
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	172.454.645
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.023.750
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	268.500.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	43.287.500
5.1.02.02.04.0417	Belanja Sewa Manual	11.200.000
5.1.02.02.04.0418	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	5.460.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	9.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.241.673.380
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	978.944.500
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	46.160.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	174.189.880
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	42.379.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	346.708.493
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	79.032.183
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	75.495.240
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	32.076.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	160.105.070
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.478.820.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	227.620.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	30.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	14.600.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	950.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	115.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	189.250.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	140.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	1.500.000
5.1.02.02.08.0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	80.850.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	730.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.740.250.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	300.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	26.500.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	150.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	33.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.245.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.068.250.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	281.150.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	559.350.000
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	77.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	182.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	92.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	90.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.619.745.080
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.619.745.080
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	134.565.950
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.514.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	11.400.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	490.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.715.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	39.060.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	500.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	260.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.874.450
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	62.752.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.542.722.229
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.062.481.559
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	192.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	153.730.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	120.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	359.627.975
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	94.818.930
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	8.800.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.727.833.815
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	258.400.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	11.337.765
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.059.182.477
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	81.254.920
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	859.728.920
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.986.665
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	89.889.470
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	41.410.250
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	137.500.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.050.000
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	11.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	37.390.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	3.600.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	96.823.500
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	877.642.549
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	78.483.840
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	419.743.115
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.304.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	282.943.368
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	42.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.195.448.670
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.342.854.070
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	198.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	554.594.600
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.204.792.000
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	4.893.270.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	75.000.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	16.522.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.080.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	2.080.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	33.490.947.225
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.468.347.225
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.257.353.535
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.210.993.690
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.022.600.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaâLuar Negeri	1.022.600.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.992.025.460
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.915.605.460
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	105.355.460
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.273.350.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	90.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	446.900.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.076.420.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.054.270.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	22.150.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.291.363.354
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.291.363.354
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.291.363.354
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.202.628.620
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.202.628.620
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.202.628.620
5.1.05	Belanja Hibah	16.823.187.778
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.872.624.278
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.386.859.278
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.386.859.278
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.108.265.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.108.265.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	377.500.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	377.500.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.096.508.080
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	22.458.378.080

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	22.403.804.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	22.403.804.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	54.574.080
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	54.574.080
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.638.130.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.638.130.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.638.130.000
5.2	BELANJA MODAL	169.091.131.325
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.500.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.760.942.083
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.535.432.080
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.515.493.095
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	500.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.015.493.095
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	19.938.985
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	19.938.985
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.485.374.310
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.401.843.510
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8.301.352.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	316.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	140.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	375.607.760
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.268.883.750
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	83.530.800
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	43.983.000
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	16.632.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	22.915.800
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.363.825
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	22.363.825
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	22.363.825
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.332.052.713
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.695.579.578

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.695.579.578
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	469.551.985
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	63.953.750
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.747.535
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	91.540.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	266.795.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	32.515.200
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	166.921.150
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	51.740.640
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	94.792.360
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	20.388.150
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	87.375.835
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	84.998.900
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	25.838.900
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.360.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	52.800.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.376.935
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.376.935
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.107.141.364
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.106.656.734
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.032.706.734
5.2.02.07.01.0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	73.950.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	484.630
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	484.630
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	983.216.761
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	645.534.626
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	410.506.306
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	112.178.320
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	122.850.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	337.682.135
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.967.814
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	296.714.321
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.745.176.280

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.745.176.280
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	456.519.600
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.288.656.680
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	100.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.874.703.915
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.874.703.915
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.874.703.915
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	488.105.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	488.105.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	488.105.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.453.116.310
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.771.316.510
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.771.316.510
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.537.044.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.155.541.125
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	223.750.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	432.500.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.764.100.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.815.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	667.510.735
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	196.650.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	147.200.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.269.100.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	16.553.105.650
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	3.341.500.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.442.500.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	35.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	116.399.800
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	116.399.800
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	116.399.800
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.822.087.152

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	42.235.925.731
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.638.225.731
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	38.167.025.731
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.471.200.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.597.700.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.597.700.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	37.188.745.400
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	36.838.745.400
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	350.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	350.000.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.821.860.021
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.222.803.971
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.189.803.971
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	33.000.000
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	599.056.050
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	599.056.050
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	3.575.556.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.575.556.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.575.556.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.554.985.780
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182.954.500
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	182.954.500
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	182.954.500
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	84.620
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	84.620
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	84.620
5.2.05.06.01.0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	850.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	850.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	850.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.246.052.560
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.246.052.560
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.246.052.560
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	275.894.100
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	275.894.100
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	275.894.100
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	4.812.400			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.812.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	5.459.600			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.459.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	Belanja Jasa	3.974.400			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	3.974.400		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	6.025.600			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.025.600		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	35.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	35.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000		
Jumlah Belanja											7.914.931.714			
Total Surplus/(Defisit)											(7.914.931.714)			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0			

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah**

**u.b.
Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WICOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**

**WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**